

Journal of Economics and Business Aseanomics

Journal homepage <http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba>

Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai *Good Governance* Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang

Wira Pradipta¹, Utpala Rani²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang

Article

Information

History of article:

Received: 13-10-2020

Accepted: 22-12-2020

Keywords: System, Effectiveness, Service Quality

Abstract

Management of data and information in an institution can support national development, but some are still less effective and efficient. This study aims to determine the application of information systems to achieve Good Governance in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Land Agency of Magelang City. The method used in this study was interviews with staff at the Magelang City Land Agency. The results find that the development of information technology and supporting infrastructure created opportunities to develop a more reliable, efficient, and timely computerized application for land activities (KKP) within the National Land Agency (BPN). The growing need for more accessible land information demanded by the community (policy recipients) and the government (policymakers) has increased higher than before. However, on the other hand, there are obstacles, such as the unfinished mapping of land parcels. The implication of this research is the Land Office needs to guide operators to better service quality.

Kata kunci:

Sistem, Efektivitas, Mutu Pelayanan

JEL Classification:
M15; M11; M48

Abstrak

Pengelolaan data dan informasi pada suatu lembaga dapat mendukung pembangunan nasional, tetapi pada kenyataannya masih terdapat yang kurang efektif dan efisien. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi untuk mencapai Good Governance yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara pada beberapa staff di Badan Pertanahan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya menciptakan peluang untuk dikembangkannya Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang lebih handal, efisien dan tepat waktu di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertumbuhan kebutuhan informasi mengenai pertanahan yang lebih mudah diakses yang diminta oleh masyarakat (penerima kebijakan) dan pemerintah (pembuat kebijakan) meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, disisi lain terdapat kendala yaitu belum tuntasnya pemetaan bidang tanah. Implikasi pada penelitian ini adalah Kantor Pertanahan perlu melakukan pembinaan bagi operator untuk kualitas layanan yang lebih baik.

1. Pendahuluan

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria / pertanahan dan tata ruang dalam pemerintah untuk membantu menjalankan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memberi solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses menghilangkan hambatan perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa. Seperti, wilayah pertambangan yang berada di bawah kawasan lindung, wilayah eksplorasi migas yang bersinggungan dengan pertanian, budidaya perikanan, dan kawasan lindung pantai.

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengadaan di bidang jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemenuhan kepentingan sangat berperan penting bagi kelangsungan dan tegaknya citra sistem pemerintahan. Di beberapa kasus dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kota Magelang masih ditemukan sistem informasi yang belum efisien dan lemah untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja serta teknologi, diharapkan dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terkendali, praktis, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai perkembangan dinamika masyarakat. Sementara untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang sangat berpengaruh. Kemampuan adanya komputer telah membantu perkembangan konsep karena telah membuka dimensi baru untuk digunakan dalam pelayanan bagi sebuah organisasi pemerintahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi untuk mencapai Good Governance yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kota Magelang.

Pengelolaan data dan informasi pertanahan yang baik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, lingkungan dan sosial (Williamson *et al.*, 2010), sehingga pengelolaan data dan informasi pertanahan yang baik mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Tugas pemerintah di bidang pertanahan di Indonesia, yang meliputi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pendaftaran tanah, survei, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 20 tahun 2015, merupakan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Penggunaan sistem informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) menunjang pelaksanaan kegiatan yang memberikan berbagai manfaat bagi para pegawai sampai pada saat ini. Namun dalam hal tertentu sistem KKP tidak dapat diberlakukan, seperti pada saat pemadaman listrik, jaringan internet terganggu, dan *server down*. Mengingat sistem KKP sebagai salah satu instrumen pengendalian internal, keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai *Good Governance*. Kualitas pelayanan yang terbaik harus di terapkan karena tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan setiap instansi-instansi pemerintahan di tujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan.

2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional

Menurut O'Brien & Marakas (2011), Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi yang terorganisir atas sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang berurusan dengan proses penyimpanan, pengambilan/pemanfaatan, perubahan dan penyajian informasi dalam suatu organisasi. Fungsi dan peran SI dalam suatu organisasi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan (level manajer utama), mendukung pengawasan dan membantu kegiatan analisis permasalahan (level manajer menengah), dan membantu menyederhanakan kompleksitas kebijakan organisasi sehingga mudah dipahami dan membantu menciptakan produk baru/ level operator (Askenäs & Westelius, 2003; Laudon & Laudon, 2007; O'Brien & Marakas, 2011).

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan

Komputerisasi layanan pertanahan dimulai tahun 1997 dengan implementasi LOC atau komputerisasi kantor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2005). LOC dikembangkan bersama antara Indonesia (BPN) dan Spanyol (CIMSAs). LOC menyerap dana sejumlah 700 milyar rupiah yang terdiri atas tiga fase: Fase 1, Fase 2A dan Fase 2B (CIMSAs Ig AIE, 2015). LOC menggunakan perangkat lunak pengelola basis data spasial Smallworld yang merupakan aplikasi spasial buatan General Electric. Smallworld memiliki karakteristik: mampu mengelola basisdata

spasial, berorientasi objek, dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang memerlukan data spasial, berteknologi Java dengan memanfaatkan DBMS Oracle Spasial (General Electric, 2014). Mengakomodir kondisi khusus beberapa Kantah, dibangunlah aplikasi SAS. Aplikasi ini dibangun sebagai bentuk sederhana dari Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan, seperti yang diusulkan Mustofa & Aditya (2009).

Good Governance

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000), *Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

3. Data dan Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan penjelasan inovasi yang ada dalam program pelayanan sertifikat tanah melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Magelang yang terletak di Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo No.2 Kota Magelang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari-13 Februari 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara, dimana penulis melakukan interview dengan staff bagian tata usaha dan staff bagian hubungan hukum pertanahan mengenai penerapan inovasi Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait penerapan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan

(KKP). Selain itu teknik pengumpulan data diperoleh dari Observasi atau pengamatan peneliti yang juga digunakan dalam penelitian ini.

4. Hasil

Pengimplementasian sistem dalam hal ini disesuaikan dengan prinsip pengembangan sistem informasi yang berkesinambungan, pembangunan aplikasi menyesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan (U.S. House of Representatives, 1999). Prinsip pengembangan sistem model SDLC spiral bisa digunakan dalam hal ini karena memiliki keunggulan fleksibilitas menghadapi dinamika faktor internal maupun faktor eksternal (Boehm, 2000). Sistem informasi yang dikembangkan di BPN adalah aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), oleh karenanya aplikasi SIP-P yang hendak dibangun dan dioperasikan dalam koridor aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah, pemerintah diharapkan mampu mengeluarkan sebuah konsep pelayanan publik yang memang dibutuhkan masyarakat dalam proses pelayanan sertifikasi tanah. Namun proses ataupun prosedur pelayanan sertifikasi tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah sering mengalami kendala pada proses administrasi dan prosedur pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Hasil wawancara beberapa pegawai BPN menunjukkan bahwa inovasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) menjadikan segala urusan prosedural sertifikasi tanah menjadi lebih mudah dalam pencatatan data, lebih efisien dan sangat membantu para pegawai BPN. Akan tetapi, para pegawai BPN juga mengeluhkan tentang kekurangan sistem KKP. Sistem KKP sendiri digunakan oleh seluruh Kantor BPN di Indonesia sehingga sering kali mengalami *server down* dan menghambat proses pelayanan. Untuk itu dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan *server* KKP. Kendala yang lain juga bermunculan seperti jaringan internet mengalami kerusakan dan mati listrik. Di BPN Kota Magelang sendiri sudah memiliki genset, namun seringkali tidak dapat menyala.

5. Pembahasan

Setelah mengetahui fenomena yang ada di BPN Kota Magelang, kualitas pelayanan yang terbaik harus diterapkan karena tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan setiap instansi-instansi pemerintahan di tujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Mengingat sistem KKP sebagai

salah satu instrumen pengendalian internal, keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai *Good Governance*.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Bagaimanapun, suatu badan atau lembaga di katakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses pengungkapan dan transparansi dipatuhi. Dalam hal ini, ketika kualitas sistem informasinya baik dan tata kelola di BPN baik, maka pelayanan di BPN juga semakin meningkat. Untuk mencapai *Good Governance*, BPN sendiri perlu menerapkan beberapa prinsip seperti:

a) Kemandirian (*Indenpency*)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana BPN dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip lembaga pemerintah yang sehat.

b) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BPN. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara BPN dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

c) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka BPN akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).

d) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan BPN terhadap prinsip lembaga pemerintah yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

6. Kesimpulan

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengadaan di bidang jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Di beberapa

kasus dalam peningkatan kualitas pelayanan masih ditemukan sistem manajemen yang belum efisien dan lemah untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan kualitas mutu dalam memberi pelayanan yang efektif perlu diperbaharui dan ditingkatkan demi terciptanya kepercayaan dari masyarakat.

Mutu sendiri juga dianggap sebagai suatu yang sifatnya abstrak sehingga tidak bisa diukur begitu saja meskipun dengan tersedianya modal yang mencukupi. Sementara untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang sangat berpengaruh. Kemampuan adanya komputer telah membantu perkembangan konsep karena telah membuka dimensi baru untuk digunakan dalam pelayanan bagi sebuah organisasi pemerintahan.

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan setiap instansi-instansi pemerintahan di tujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya metode pengembangan kinerja dalam pelayanan publik, keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai *Good Governance*.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang diberikan kepada Badan Pertanahan Kota Magelang yaitu Kantor Pertanahan harus memiliki kontribusi nyata dan teratur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan ekstra, dan meningkatkan tatanan kepengurusan. Selain itu, Kantor Pertanahan perlu memperbaharui aplikasi atau teknologi untuk menciptakan efektivitasnya pelayanan kepada masyarakat, kebijakan baru dengan adanya aplikasi KKP diharapkan dapat memperlancar jalannya seluruh komponen manajemen kinerja di Kantor Pertanahan Kota Magelang dan perlu dilakukan pembinaan bagi operator atau petugas loket harus terus dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencari masukan-masukan atau mungkin terjadi penyempurnaan kualitas pelayanan guna mencapai *Good Governance*.

Daftar Pustaka

- Askenäs & Westelius, (2003). Five Roles of an Information System: A Social Constructionist Approach to Analysing the Use of ERP Systems, *Informing Science. Informing Science: the international journal of an emerging transdiscipline*, 6, 209–220.
- Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2005). Land Office Computerization (LOC). Workshop LOC di Jakarta. Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2011). Pembangunan GeoKKP. Workshop KKP di Kanwil BPN Prov. D.I. Yogyakarta tanggal 5 Desember 2011. Badan Pertanahan Nasional.
- Boehm, (2000). *Spiral Development: Experience, Principles , and Refinements (No. CMU/SEI-2000-SR-008)*. (W. J. Hansen, Ed.). Pittsburgh, Pennsylvania, US: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
- CIMSA Ig AIE, (2015). *LOC menyerap dana sejumlah 700 milyar rupiah yang terdiri atas tiga fase: Fase 1, Fase 2A dan Fase 2B*.
- Ferdinand, A. (2006). *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2008). Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program Amos 16.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, W. P. P., Harsono, M. (2016). Aplikasi technology acceptance model (TAM) pada komputersasi kegiatan pertanahan. *Jurnal Economica*, 12(01).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi.
- Kementerian ATR/BPN. (2014). Layanan Online Kantor Pertanahan (LOKET) dan Pelayanan Mandiri Akta Pertanahan (PERMATA). Diambil 10 Maret 2015, dari <http://www.bpn.go.id/Berita/SiaranPers/layanan-online-kantor-pertanahan-loket-danpelayanan-mandiri-akta-tanah-permatadiresmikan-4786>
- Kementerian ATR/BPN. (2015). Komputerisasi Layanan Pertanahan. Diambil 1 Februari 2015, dari <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan>
- Laudon & Laudon, (2007). *Management Information Systems (10th ed.)*. Pearson Education, Inc.
- Lembaga Administrasi Negara (2000). *Akuntabilitas & Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Mustofa, F. C., & Aditya, T. (2009). Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan untuk PPAT Berbasis Web Services. *BHUMI - Jurnal Ilmiah Pertanahan STPN Yogyakarta*, 1, 57–70.
- O'Brien & Marakas, (2011). *Management Information Systems. Eighth Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik.

Perpres No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Priyono, A. H., Amrin. (2019). Sistem informasi pengelolaan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Jakarta. *Jurnal Mantik Penusa*, 3(02).

Suara Ombudsman. (2008). Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka Peningkatan Kualitas Penanganan Keluhan Bidang Pertanahan. Artikel. ISSN: 1412 – 3932.

U.S. House of Representatives, (1999). Systems Development Life-Cycle Policy. Diambil dari <http://www.house.gov/content/cao/procurement/refdocs/SDLCPOL.pdf>

Williamson et al., (2010). Land Administration for Sustainable Development. California, USA: ESRI Press Academic.